

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya. Bahkan dibalik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Sebab, kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah (1) Hukum, (2) hukm dan ahkam, (3) Syari'ah atau syari'at, (4) fikih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.<sup>1</sup> Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*. Semua aspek kehidupan dari mulai manusia lahir ke dunia dan sampai manusia wafat, Islam telah memberikan aturan-aturannya termasuk masalah makanan dan minuman yang halal atau yang haram.

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cetakan keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 38

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan makanan sehari-harinya. Mereka membutuhkan makanan untuk kebutuhan dan kesehatan jasmani serta rohaninya. Sejak dahulu ummat dan bangsa-bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.<sup>2</sup> Dalam memilih makanan yang baik, sebagai ummat muslim hendaknya memilih makanan yang sehat menurut Islam. dalam ajaran Islam, banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika ketika makan, sampai mengatur idealitas dan kuantitas di dalam perut. Salah satu peraturan yang terpenting adalah larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram atau belum diketahui kehalalannya, akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Seruan Allah kepada ummat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan menyehatkan tidak lain adalah demi tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168:<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta:Rabbani Pers, 2002) hal. 45

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz1-Juz 30*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006) hal. 32

Dewasa ini, isu tentang produk makanan dan minuman yang diharamkan dan berbahaya sedang mendapatkan perhatian masyarakat. produk-produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya.<sup>4</sup>

Begitu juga isu tentang sertifikasi halal yang dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi hangat diperbincangkan karena sejak SK Menteri Agama RI Nomor 519 tahun 2001, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Menteri Agama menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.<sup>5</sup>

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang<sup>6</sup>. Tujuan Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh

---

<sup>4</sup> Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan yang Haram*, (UIN-Malang,2007), Hal. iii

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal Menteri Agama Indonesia Pasal 1.

<sup>6</sup> [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/55/1360/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1) diakses tanggal 05 Agustus 2017, pukul 16.27

produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.<sup>7</sup> Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk layak untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu dan melewati serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh MUI untuk memperoleh sertifikat halal. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha memperoleh label halal dari MUI untuk kemudian dicantumkan pada label produknya. Sertifikasi halal ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan pelaku usaha harus melakukan perpanjangan untuk memperoleh sertifikasi kehalalan produknya kembali.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin setiap konsumen berhak untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu produk. Sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Konsumen; bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.<sup>8</sup> Hak atas informasi ini sangat penting karena jika informasi yang diberikan kepada konsumen tentang suatu produk tidak memadai, maka dapat merupakan salah satu bentuk cacat produk, yakni disebut dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai<sup>9</sup>

Disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014, juga menuntut untuk disegerakannya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pembentukan BPJPH merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 tentang

---

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 butir c

<sup>9</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-7, Edisi Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 41

Jaminan Produk Halal. BPJPH saat ini telah terbentuk dan masuk dalam struktur Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag. BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan.<sup>10</sup> Struktur BPJPH terdiri atas Sekretariat dan tiga pusat, yaitu: Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal.<sup>11</sup>

Menurut UU ini, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ((BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dan jika diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. “Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden,”<sup>12</sup>

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang antara lain: a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH; c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal pada produk luar negeri; dan d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agama Pasal 45 ayat (2).

<sup>11</sup> <https://www2.kemenag.go.id/berita/493685/bpjph-mulai-26-april-tempati-gedung-lab-halal-pondok-gede>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2017 pukul 14.40 WIB.

<sup>12</sup> Ibid.,

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud, BPJPH bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>13</sup>

UU ini menegaskan, permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalal Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. “Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.”<sup>14</sup>

Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.

MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

---

<sup>13</sup> <https://kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2017 pukul 15.01 WIB.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 31 ayat (3)

“Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan,”<sup>15</sup>

Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI. Penambahan rantai proses menambah, daya saing produk Indonesia turun.<sup>16</sup> waktu, tenaga dan biaya. Ujung-ujungnya beban konsumen tambah

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. Kemasan produk; b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk.

“Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak,”<sup>17</sup>

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku.

Dari penjelasan diatas, maka penulis ingin mengambil judul  
*“Pelaksanaan Sertifikasi Halal Menurut UU Nomor 33 tahun 2014  
 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”*

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 34 Ayat (2)

<sup>16</sup> M. Ade Septiawan Putra, Lembaga Sertifikasi Halal Pasca Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, Hal. 56.

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 39



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah guna mempermudah pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal di Indonesia Sebelum dan Sesudah diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana Kewenangan MUI Sebelum dan Sesudah diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari Siyasah Dusturiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal di Indonesia sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui Kewenangan MUI Sebelum dan Sesudah diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
3. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.



#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yakni secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya jurusan Siyasah, serta dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian dalam hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Indonesia.
2. Segi praktis, dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Indonesia.

#### **E. Kerangka pemikiran**

Negara sebagai entitas masyarakat memiliki tujuan dan fungsinya. Secara garis besar, negara bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi rakyatnya. negara berfungsi menyelesaikan sengketa, konflik dan pemenuhan kebutuhan bersama dalam pencapaian kebahagiaan.<sup>18</sup>

Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Sementara menurut Charles E. Merriam, untuk mencapai tujuan negara,

---

<sup>18</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm.59

negara harus mempunyai lima fungsi, yaitu keamanan eksternal, ketertiban internal, kesejahteraan umum, kebebasan dan kadilan.<sup>19</sup>

Untuk tercapainya tujuan negara adalah dengan menggunakan hukum sebagai sarana dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.<sup>20</sup>

Teori hukum yang di gunakan yang beraliran *utilitas* ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakatnya<sup>21</sup>. Salah satu tokoh yang dikenal dalam aliran ini adalah Jeremi Bentham dengan teorinya *The grates happiness of the great people*. dengan mengajarkan tujuan hukum yang utilitas bahwa:

1. Tujuan hukum itu untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang;
2. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat;
3. Ada tipe studi hukum ekspositor (*expository jurisprudence*); yaitu studi hukum sebagaimana adanya yang objeknya menemukan dasar-dasar dari asas-asas hukum melalui analisis hukum, serta ilmu hukum sensorial (*ensorial jurisprudence*), yaitu studi kritis terhadap hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum dan pengoprasiaannya.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm.60

<sup>20</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 84

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 83

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 146

Tujuan hukum sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan bagi masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengedepankan kepentingan umum sebagai tanggung jawab pemerintah dalam hubungan pemerintah dengan warga negaranya.

Di lain pihak, agama juga mempunyai hukumnya sendiri dimana hukum tersebut adalah untuk kemaslahatan umat manusia didunia dan akhirat sekaligus. Terlepas hukum agama tersebut diadopsi oleh pemerintahan atau tidak dalam sebuah negara, pada dasarnya agama tetap mempunyai aturannya sendiri yang diyakini sebagai aturan atau hukum dari Sang Khalik.

Dalam Islam, dikenal dengan Siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu : konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.<sup>23</sup>

Salah satu dari lima hak dasar di atas, salah satunya mengenai hak dan kewajiban negara. Kewajiban negara sebagai pelindung sekaligus tempat mengantungkannya tujuan dari keinginan seluruh rakyatnya, di tuangkan dalam cita-cita dan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yang berorientasi kepada

---

<sup>23</sup> Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 1.

sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip “*kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat*”<sup>24</sup>

Secara esensial, prinsip-prinsip metodologis masalah adalah (1) hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudharatan; (2) setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan, sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat islam; (3) kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perorangan; (4) masalah dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama menentukan kemaslahatan umum dan mana kemaslahatan individual<sup>25</sup>.

Menurut Imam Malik, dengan teori nya mengenai *al-mashlahah al-mursalah* (untuk kepentingan umum), menyebutkan bahwa:

1. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah;
2. Kepentingan dan kemaslahatan umum itu harus selaras (in harmony with) dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari'ah itu sendiri; dan

Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.<sup>26</sup>

Fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal ketatanegaraan

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 53

<sup>25</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2012), hlm.75

<sup>26</sup> H. Muhammad Tahir Ashary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.9

dalam sistem ketatanegaraan islam. Secara bahasa Pengertian Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya adalah mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Secara Istilah adalah “*tadbiru mashalihul ‘ibadi ‘ala waqfi al-syar’i*” yakni pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.<sup>27</sup>

Siyasah Dusturiyah dipilih untuk dapat menilai sejauh mana kesesuaian penyelesaian permasalahan di kehidupan modern dengan menggunakan teori dalam islam. Sesuai dengan definisi siyasah dusturiyah yakni pengaturan terkait dengan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakatnya. Pembatasan ruang lingkup dalam fiqh siyasah dusturiyah hanya membahas yang terkait dengan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>28</sup>

Pemaparan singkat tentang fiqh siyasah diatas tergambar bahwa siyasah adalah pembuatan kebijakan yang diwujudkan dalam pengaturan, serta dilaksanakan dan diawasi untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan bagi umat manusia di satu sisi dan di sisi lain menjauhkannya dari kemafsadatan. Oleh karena itu, di dalam siyasah selalu diupayakan jalan-jalan yang menuju kepada kemaslahatan (*fathu dzari’ah*) dan selalu ditutup dan dihindarkan jalan-jalan yang mengarah kepada kemafsadatan (*sadzu dzari’ah*).

---

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 25-26

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2009), hal 47.

Fiqh siyasah berpijak pada *maqashidu* keumatan atau *hifdzu al-ummah* dan di dalamnya (fiqh siyasah) ada pembagian kekuasaan sejak zaman ke kalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Maksud kaidah *Al-wilayatu khoshshotu aqwa alwilayati ammah* adalah bahwa kekuasaan lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya daripada lembaga umum.<sup>29</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Sesuai masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dalam memahami suatu fenomena yang didasarkan pada tradisi metodologi yang khas, yang menggali atau mengeksplor suatu masalah sosial atau masalah manusia. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Sertifikasi Halal yang setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bukan lagi menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia pasal 1. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data

---

<sup>29</sup> A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis)*, (Jakarta Kencana, 2007), hal. 150

primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.<sup>30</sup> Penelitian Yuridis Normatif terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian tentang sejarah hukum, dan penelitian tentang perbandingan hukum.<sup>31</sup> Jadi Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis serta memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai Pelaksanaan Sertifikasi Halal sebelum dan sesudah diterbitkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta Kewenangan yang ada di dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan kajian melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi dan bahan bacaan yang tersedia sesuai relevansinya dengan materi yang dibahas.

---

<sup>30</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 142.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm 12.



## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal Menteri Agama Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agama, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- b. Data sekunder, merupakan data kepustakaan dan dokumen yang telah ada sebelumnya dalam memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisis pada data primer.
- c. Data tersier, bahan data tersier merupakan data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, majalah, koran, Website, blog dan lainnya.

## 3. Teknik pengumpulan data

Penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber literatur dan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, artikel ilmiah, dan makalah yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara mengenai urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen dokumen yang ada di Website Halal MUI, dan Jurnal Halal.

**4. Analisis Data**

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.<sup>32</sup> Menurut Burgin, bahwa analisis data dalam penelitian langsung bersama proses pengumpulan data dilanjutkan dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>33</sup>

Pentingnya analisis data dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diajukan, sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang diteliti perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap semua data yang ada untuk mengetahui

---

<sup>32</sup> Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103.

<sup>33</sup> Burgin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 99

validitasnya. Kemudian untuk selanjutnya melakukan pengelompokan data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan laporan penelitian.

